



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AFRIZAL AZHAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **243004**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 3.540.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 369 m<sup>2</sup>/400 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 375 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 715 m<sup>2</sup>/216 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.134 m<sup>2</sup>/540 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
5. Tanah Seluas 600 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 20 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
7. Tanah Seluas 80.000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
8. Tanah Seluas 350 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 95.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



2. MOBIL, TOYOTA DYNA 130 HT DUMP TRUCK Tahun 2017,  
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.005.160
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.693.005.160
III. HUTANG	Rp.	900.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.793.005.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.